

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) DI NAGORI SIANTAR ESTATE KECAMATAN
SIANTAR KABUPATEN SIMALUNGUN**

SKRIPSI

OLEH:

NURAZMI IZMI RUSDI

148520033



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2018

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) DI NAGORI SIANTAR ESTATE KECAMATAN
SIANTAR KABUPATEN SIMALUNGUN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

OLEH:

NURAZMI IZMI RUSDI

148520033



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NURAZMI IZMI RUSDI

NPM : 148520033

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK

JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI
NAGORI SIANTAR KECAMATAN SIANTAR
KABUPATEN SIMALUNGUN

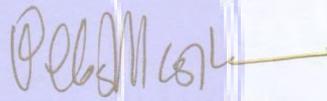
Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Husni. M. Thamrin Nst, M.Si


Beby Mashito, S.Sos, M.AP

Dekan Fakultas Isipol

Ka. Prodi




Prof. Dr. H.V. Arif Nasution, MA


Dra. Hj. Rsmala Dewi, MPd

Tanggal Lulus : 4 Juni 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa penulisan Skripsi ini yang saya susun untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil dari penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya tulis orang lain telah dicantumkan sumbernya secara jelas sesuai norma, akidah, dan etika penulisan karya ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Medan Area.

Medan, 4 Juni 2018

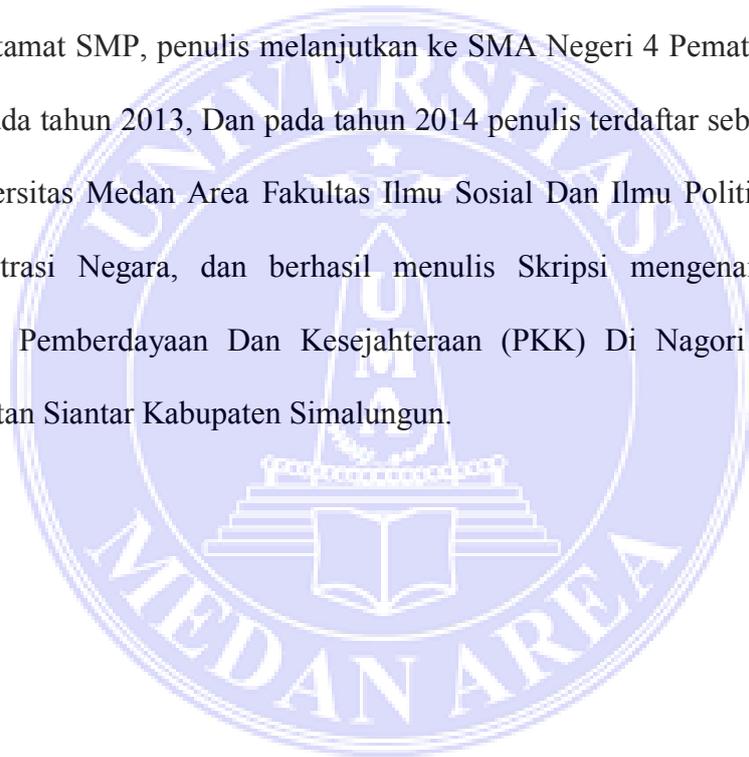


Nurazmi Izmi Rusdi

148520033

RIWAYAT HIDUP

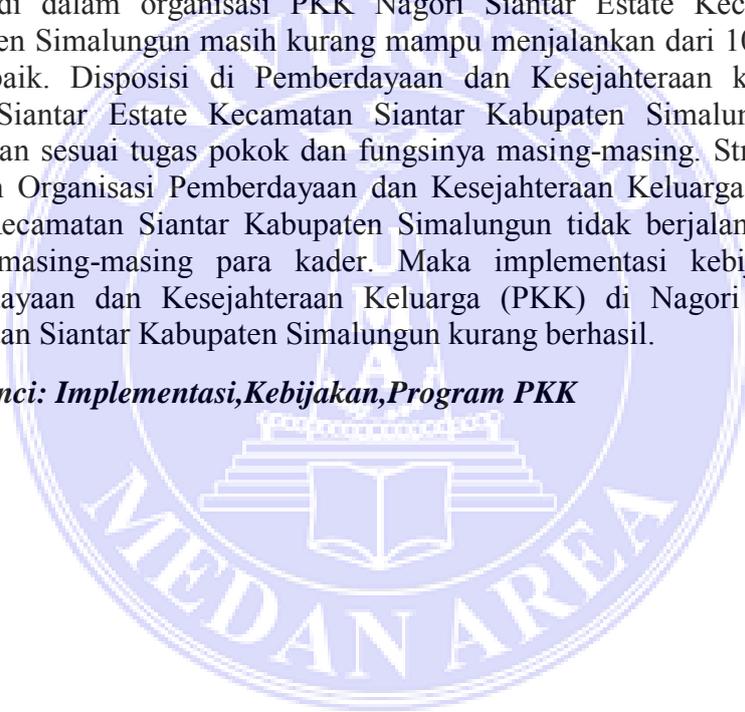
Nurazmi Izmi Rusdi, lahir pada tanggal 31 Mei 1995, di Nagori Siantar Estate Kabupaten Simalungun Kecamatan Siantar. Penulis merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara, dari pasangan Muhammad Rusdi dan Nurasiah. Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SDN 122339 Pematang Siantar pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 4 Pematang Siantar dan tamat pada tahun 2010. Setelah tamat SMP, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 4 Pematang Siantar dan tamat pada tahun 2013, Dan pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara, dan berhasil menulis Skripsi mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan (PKK) Di Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.



ABSTRAK

Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan kebijakan Nasional yang dibuat Pemerintah Indonesia sejak jaman Reformasi Baru, tetapi di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan seperti kurangnya sosialisasi ke para anggota PKK dan masyarakat mengenai 10 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ini, tingginya perkembangan jaman, rendahnya kesadaran masyarakat bahwa program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mencakup seluruh aspek kehidupan yang bertujuan memberdayakan masyarakat dan mensejahterakan keluarga Indonesia dari Desa hingga Kota. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dalam proses komunikasi antar kader dan ke masyarakat belum berjalan baik, dikarenakan sosialisasi yang masih kurang maksimal. Sumber daya manusia (SDM) di dalam organisasi PKK Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun masih kurang mampu menjalankan dari 10 program PKK secara baik. Disposisi di Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK) Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun belum di laksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Struktur Birokrasi di dalam Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tidak berjalan sesuai dengan bidang masing-masing para kader. Maka implementasi kebijakan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun kurang berhasil.

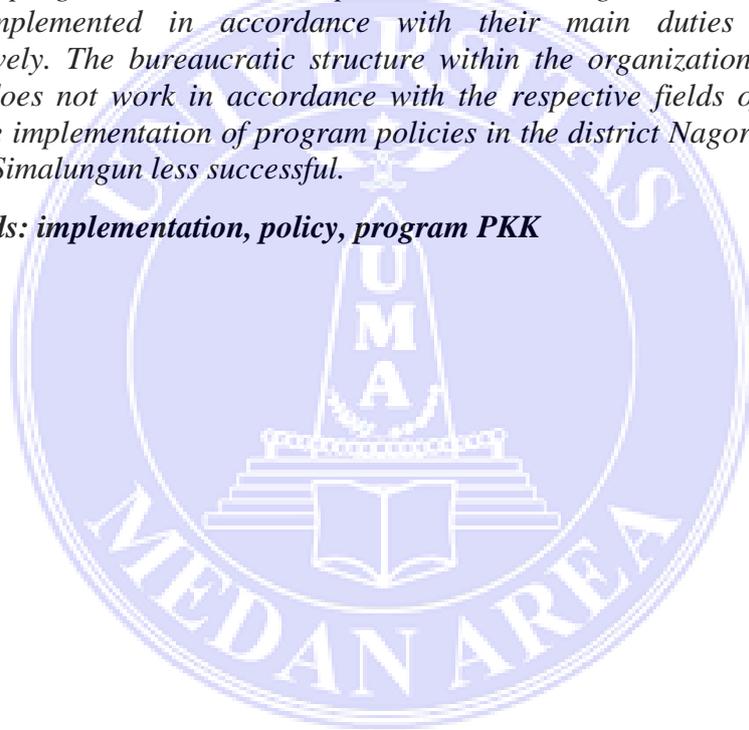
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Program PKK



ABSTRACT

Program family empowerment and welfare (PKK) is a national policy made by the Indonesia goverment since the time of new reformasi, but in the implementation there one some problems such as lack of socialization to the members of PKK and the comunity on these ten programs family empowerment and welfare (PKK), the high development of the era, low public awareness that the program family empowerment and wefare (PKK) covers all aspectf of life that aims to empowerment the community and prosper the Indonesia family from village to town. Based on the results of research shows that the implementation of program PKK policies in the Nagori Siantar Estate district Siantar district Simalungun in the communication process between members and society has not gone well, in because the sociallzation is still less than the meximum. Human resources within the organization PKK Nagori Siantar Estate still less able to run from ten programs PKK well. Disposition at PKK Nagori Siantar Estate has not been implemented in accordance with their main duties and functions respectively. The bureaucratic structure within the organization of the Siantar Estate does not work in accordance with the respective fields of the members. Then the implementation of program policies in the district Nagori Siantar Estate district Simalungun less successful.

Keywords: *implementation, policy, program PKK*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat rahmat dan anugerah-NYA, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas dan merupakan satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area. Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **“Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun”**.

Selama penyusunan skripsi ini penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda dan Ibunda serta keluarga yang telah mendukung dan memberikan bantuan moril serta materil dan motivasi dalam studi saya.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Arif Nasution selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd selaku ketua jurusan Administrasi Publik dan Dosen Penasehat Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
4. Bapak Drs. Husni. M. Thamrin Nst, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan arahan dan meluangkan

waktu, tenaga, dan pikiran serta sarannya untuk mengarahkan saya dalam penyusunan proposal ini dengan baik.

5. Ibu Beby Mashito, S.Sos, M.AP selaku pembimbing II atas segala komentar, kritik dan saran serta arahan mengenai penulisan dalam proposal ini bersifat membangun.
6. Bapak Nasrullah Hidayat, S,Pd, M.Sc selaku sekretaris yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran dan arahan dalam penyusunan proposal ini.
7. Seluruh Staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Iniversitas Medan Area yang telah banyak membantu dalam proses pengurusan berkas-berkas yang saya butuhkan untuk mengikuti prosedur kelulusan.
8. Bapak Pangulu Muhammad Rusdi dan Ibu Nurasih selaku Ketua PKK Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.
9. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMA, khususnya teman seperjuangan Mahasiswa Administrasi Publik angkatan 2014 yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun selalu penulis nantikan. Demikianlah, semoga tulisan penelitian ini bermanfaat untuk kita semua.

Medan, 4 Juni 2018

Nurazmi Izmi Rusdi
148520033

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR BAGAN.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Uraian Teori.....	6
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	6
2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi implementasi.....	7
2.1.3 Pengertian Program.....	9
2.1.4 Tujuan Kebijakan.....	11
2.1.5 Proses Kebijakan Publik.....	11
2.1.6 Pemberdayaan Masyarakat.....	12
2.1.7 Program PKK.....	13
2.2 Kerangka Pemikiran.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
3.1 Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu.....	20
3.1.1 Jenis Penelitian.....	20
3.1.2 Lokasi Penelitian.....	20

3.1.3 Waktu Penelitian.....	20
3.2 Metode Pengumpulan Data	21
3.3 Metode Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1 Hasil Penelitian.....	24
4.1.1 Sejarah Nagori	24
4.1.2 Kondisi Geografis Nagori.....	25
4.1.3 Demografi	26
4.1.4 Keadaan Ekonomi.....	30
4.1.5 Struktur Organisasi PKK	32
4.1.6 Visi dan Misi PKK	34
4.1.7 Tugas dan Fungsi PKK.....	35
4.1.8 Tugas Pokok Peranan & T.jawab Masing-masing Unsur.....	36
4.1.9 Penerapan 10 Program PKK.....	42
4.2 Pembahasan	58
4.2.1 Implementasi Program PKK.....	58
4.2.2 Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Program PKK.....	59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	61
5.1 Simpulan	61
5.2 Saran.....	62
Daftar Pustaka.....	63
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Nomor	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran.....	19
Bagan 4.1 Struktur Organisasi PKK.....	32



DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 4.1 Tata Guna Tanah.....	26
Tabel 4.2 Pertambahan Penduduk Tahun 2016-2018.....	27
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	28
Tabel 4.4 Gizi Balita.....	29
Tabel 4.7 Kondisi Infrastruktur Permukiman.....	29
Tabel 4.8 Mata Pencaharian Penduduk.....	30



DAFTAR GAMBAR

Nomor

Halaman

Gambar 1. Sosialisasi Kecamatan Mengenai Perencanaan Sehat Lansia.....57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan akan berhasil dengan efektif apabila di satu pihak ada fasilitas, kemudahan-kemudahan dan sistem pelayanan yang disediakan pemerintah dan di lain pihak ada partisipasi aktif seluruh masyarakat. Bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya, yang akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.

Pemberdayaan keluarga adalah segala upaya bimbingan dan pembinaan kepada keluarga untuk hidup sehat sejahtera lahir dan batin. Untuk dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, di bentuk program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Gerakan PKK merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah, dengan prinsip kerja partisipatif. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Kegiatan PKK mengharapkan perempuan khususnya ibu rumah tangga lebih berperan aktif dalam pembangunan lingkup terkecil yaitu keluarga dan lingkungan sekitarnya. Masalah dari PKK Nagori Siantar Estate sering di pandang sebagai “Ajang Kumpul-Kumpul”. Menurut data dari Kantor Kepala Desa Nagori

Siantar Estate yang penulis terima, peran dari kegiatan ini masih belum terlalu menonjol, hal ini disebabkan karena gerakan PKK secara internal masih menghadapi permasalahan terkait dengan sumber daya (manusia, sarana dan prasarana, dukungan dana), sedangkan secara eksternal masih kebijakan yang belum berpihak dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

Diharapkan organisasi ini dapat berperan besar dalam masyarakat Nagori Siantar Estate dalam membantu perekonomian masyarakat. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simalungun Pasal 28, 29. Dengan adanya Perda ini bisa menjadi landasan agar ibu rumah tangga yang menjadi anggota PKK menjadi lebih aktif dapat berdayaguna dengan Program PKK yang memiliki 10 poin utama yakni penghayatan dan pengamalan pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tatalaksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat. Melalui program PKK diharapkan perempuan memiliki wadah untuk beraktualisasi, sehingga tujuan pembangunan bisa tercapai.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 yaitu “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pelaksanaan program PKK ini sangatlah perlu di perhatikan untuk membangun dan membantu kehidupan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada dimasyarakat.

Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Siantar yang dipimpin oleh istri Camat, yang berperan aktif membantu dalam pemberdayaan masyarakat di Nagori atau Desa di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Kecamatan Siantar sendiri terbagi dari 17 Nagori, salah satunya ialah Nagori Siantar Estate yang merupakan Nagori hasil dari pemekaran Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Tahun 1999. Dan Nagori Siantar Estate memiliki anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang diketuai oleh ibu Nurasih sebagai istri dari Kepala Desa Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

Dalam Pemberdayaan masyarakat ini diperlukan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang dapat menumbuh kembangkan perilaku, kemandirian pribadi, keluarga dan masyarakat agar tidak salah dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi saat ini. Maka dari itu ada beberapa alasan mengapa penting untuk mengkaji lebih dalam tentang program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI NAGORI SIANTAR ESTATE KECAMATAN SIANTAR KABUPATEN SIMALUNGUN”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menggambarkan Implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga PKK di Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan untuk memberikan/ menemukan solusi penyelesaian dari faktor-faktor tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian dapat lebih memantapkan penguasaan disiplin ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti program ilmu Administrasi Publik pada Universitas Medan Area.

2. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, hasil penelitian dapat menambah ragam penelitian dan menjadi dokumen perguruan tinggi yang berguna untuk menjadi materi rujukan bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Bagi pihak yang diteliti atau Tim Penggerak PKK Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk menyempurnakan pelaksanaan Program Gerakan PKK atau sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi untuk evaluasi pelaksanaan PKK.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Pengertian Implementasi

Menurut Wahab (1997:45) Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan. Wahab juga mengatakan, dalam implementasi khususnya yang dilibatkan oleh banyak organisasi pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yakni: (1) pemprakarsa kebijakan/pembuat kebijakan pusat, (2) pejabat-pejabat pelaksana dilapangan, (3) aktor-aktor perorangan diluar badan-badan pemerintah kepada siapa program-program itu diwujudkan yakni kelompok-kelompok sasaran.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan negara tersebut (sistem penyampaian/penerusan kebijakan negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang dirancang secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sarana-sarana yang dikehendaki.

Berdasarkan pendapat di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

2.1.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2005:90) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yakni faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.

1) Komunikasi

Secara umum Edward III membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni:

a. Transmisi

Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah di keluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya. Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan diabaikan atau sering kali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan yang dikeluarkan.

b. Konsistensi

Jika implementasi berlangsung efektif, perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah tersebut mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan melaksanakan tugasnya dengan baik.

c. Kejelasan

Edward mengidentifikasi enam faktor terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan dan sifat pembuatan kebijakan pengadilan.

2) Sumber Daya

Sumber daya adalah faktor yang paling penting dalam implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya tersebut dapat terwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas saja menjadi dokumen.

3) Disposisi (kecenderungan atau tingkah laku)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang di miliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika

implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standart operating procedure* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak.

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks pada akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.1.3 Pengertian Program

Program pemerintah merupakan suatu bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga merupakan suatu kebijakan. Thomas R. Dye dalam Tangkilisan (2003:1) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya.

Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan “sesuatu yang tidak dilakukan”

oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan “sesuatu yang di lakukan” oleh pemerintah.

Kebijakan publik sebagai suatu program yang di ramalkan dengan tujuan-tujuan tertentu, praktek-praktek tertentu, dan nilai-nilai tertentu. Kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang di maksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat di jadikan pedoman perilaku dalam;

- 1) Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksana kebijakan.
- 2) Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang di maksudkan.

Menurut David Easton (1953:129) dalam penelitian Harmoko Rudi Kebijakan Publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah/paksa bahwa secara luas kebijakan publik dapat di definisikan sebagai suatu hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Definisi Easton ini, mensyaratkan sifat otoritatif dalam proses alokasi. Tetapi di dalam kenyataannya hanya pemerintah sajalah yang dapat bertindak secara otoritatif kepada seluruh masyarakat, apapun yang di pilih pemerintah baik bertindak maupun tidak bertindak terungkap dalam alokasi nilai.

Sehingga suatu kebijakan publik memang dibuat untuk memenuhi kepentingan publik dan dijauhkan dari kepentingan para aktor pembuat kebijakan. Dapat di simpulkan, kebijakan publik adalah suatu bentuk kegiatan yang dipilih oleh pemerintah dalam suatu bidang kegiatan untuk melakukan atau tidak

melakukan dalam memecahkan masalah publik sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat guna memenuhi tujuan dan kepentingan serta penyelenggaraan urusan-urusan publik.

2.1.4 Tujuan Kebijakan

Fungsi utama dari Negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijakan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu:

- 1) Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator)
- 2) Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal
- 3) Memadukan berbagai aktivitas
- 4) Menunjukkan dan membagi benda material dan non material

2.1.5 Proses Kebijakan Publik

Keputusan kebijakan merupakan puncak dari berbagai keputusan yang di buat selama proses kebijakan itu berlangsung. Tahap keputusan kebijakan bukan merupakan pemilihan dari berbagai alternatif kebijakan, melainkan tindakan tentang apa yang boleh di pilih. Menurut Winarno (2007:29), menyatakan bahwa masing-masing alternatif bersaing untuk di pilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah.

Untuk membuat sebuah keputusan kebijakan ada beberapa tahap yang perlu dilakukan yaitu:

- 1) Tahap Perumusan Masalah

Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam sebuah kebijakan.

2) Tahap Agenda Kebijakan

Tidak semua masalah masuk dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain.

3) Tahap Pemilihan Kebijakan dan Solusi Masalah

Di tahap ini perumus kebijakan akan di hadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlihat dalam perumusan kebijakan.

4) Tahap Penetapan Kebijakan

Kebijakan yang di ambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut.

2.1.6 Pemberdayaan Masyarakat

Definisi pemberdayaan menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Menurut Sumodingrat (2009:60) Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang di harapkan dapat menciptakan proses pengutan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat mandiri, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan taqwa.

Tujuan pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hal yang ingin di capai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, maupun menyampaikan inspirasi, mempunyai mata

pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dan pemerataan, tetapi konsep ini berpandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tiga hal:

1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik tolaknya adalah penekanan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi-potensi, kemudian diberikan motivasi dan kesadaran bahwa potensi itu dapat dikembangkan.
2. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dimana perlu langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan serta pembukaan akses kepada peluang yang akan membuat mampu dan memanfaatkan peluang.
3. Pemberdayaan mengandung arti pemihakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya. Di bangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memerhatikan dampak lingkungan tidak menciptakan ketergantungan berbagai pihak terkait terlibat serta berkelanjutan.

2.1.7 Program Pemberdayaan Kesejahteraan Dan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat bermula dari Seminar "*Home Economic*" di Bogor pada tahun 1957. Sebagai tindak lanjut dari seminar tersebut, pada tahun 1961 Panitia Penyusunan Tata Susunan Pelajaran pada Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kementerian Pendidikan bersama kementerian-kementerian lainnya menyusun 10 segi Kehidupan Keluarga.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 Segi Pokok Keluarga dengan membentuk Tim Penggerak PKK di semua tingkatan, yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh/pemuka masyarakat, para Isteri Kepala Dinas dan Isteri Kepala Daerah sampai dengan tingkat Desa dan Kelurahan yang kegiatannya didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tanggal 27 Desember 1972 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Kawat Nomor Sus 3/6/12 kepada Gubernur KDH Tk.I Jawa Tengah dengan tembusan Gubernur KDH seluruh Indonesia , agar mengubah nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Sejak itu Gerakan PKK dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan nama Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan tanggal 27 Desember di tetapkan sebagai "Hari Kesatuan Gerakan PKK" yang diperingati setiap tahun.

Hubungan kerja dalam Gerakan PKK bersifat konsultatif, koordinatif dengan tetap memperhatikan hierarki dalam setiap jenjang Tim Penggerak PKK. Prinsip Gerakan PKK adalah pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Sifat gerakan ini universal dan independen, maka penyelenggaraannya perlu dilandasi dengan peraturan perundang-undang.

Tujuan Gerakan PKK adalah memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur. Sehat sejahtera lahir dan batin. Meningkatkan pembentukan karakter keluarga melalui penghayatan, pengalaman pancasila, kegotong royongan serta kesetaraan dan keadilan gender. Untuk mencapai tujuan ini PKK dalam pelaksanaannya di lapangan perlu adanya dukungan dan peningkatan koordinasi dengan Pembina Tim Penggerak PKK di semua jenjang dan dengan lembaga lain.

Sasaran Gerakan PKK adalah keluarga, baik di pedesaan maupun perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya, dalam bidang mental spritual meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara yang dinamis serta bermanfaat berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945. Dan fisik material meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan. Kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan.

Kegiatan 10 Program Pokok PKK;

- Penghayatan dan Pengalaman Pancasila
- Gotong Royong
- Pangan
- Sandang
- Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
- Pendidikan dan Keterampilan
- Kesehatan

- Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
- Kelestarian Lingkungan Hidup
- Perencanaan Sehat

Susunan keanggotaan Tim Penggerak PKK mulai dari pusat sampai ke Desa/Kelurahan:

- a. Pusat: Ketua umum, para ketua, sekretaris umum, para sekretaris, para bendahara dan Pokja-pokja.
- b. Provinsi: Ketua, para wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan Pokja-pokja.
- c. Kabupaten/Kota: Ketua, para wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan Pokja-pokja.
- d. Kecamatan: Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan Pokja-pokja.
- e. Kelurahan/Desa: Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan Pokja-pokja.
- f. Wakil Ketua I TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota dijabat oleh istri wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- g. Wakil Ketua TP-PKK Provinsi/Kab/Kota berjumlah 4 (empat) orang sebagai koordinator Pokja dan wilayah.
- h. Wakil Ketua dan Sekretaris TP-PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan menyesuaikan dengan kebutuhan.

Kriteria anggota PKK harus berwarga Negara Indonesia, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya. Mempunyai sifat sebagai relawan, peduli terhadap upaya-upaya kesejahteraan keluarga dan masyarakat, bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi,

golongan, partai politik, lembaga atau instansi. Memiliki kemauan dan kemampuan, mempunyai cukup waktu serta dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab. Bersedia bekerja sama dan saling menghormati.

Pembina Tim Pembina Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintahan/Dinas/Instansi yang mempunyai program dibidang kesejahteraan keluarga yang dalam upaya mendukung pelaksanaan program-program Gerakan PKK pada setiap jenjang TP-PKK, dengan susunan keanggotaan:

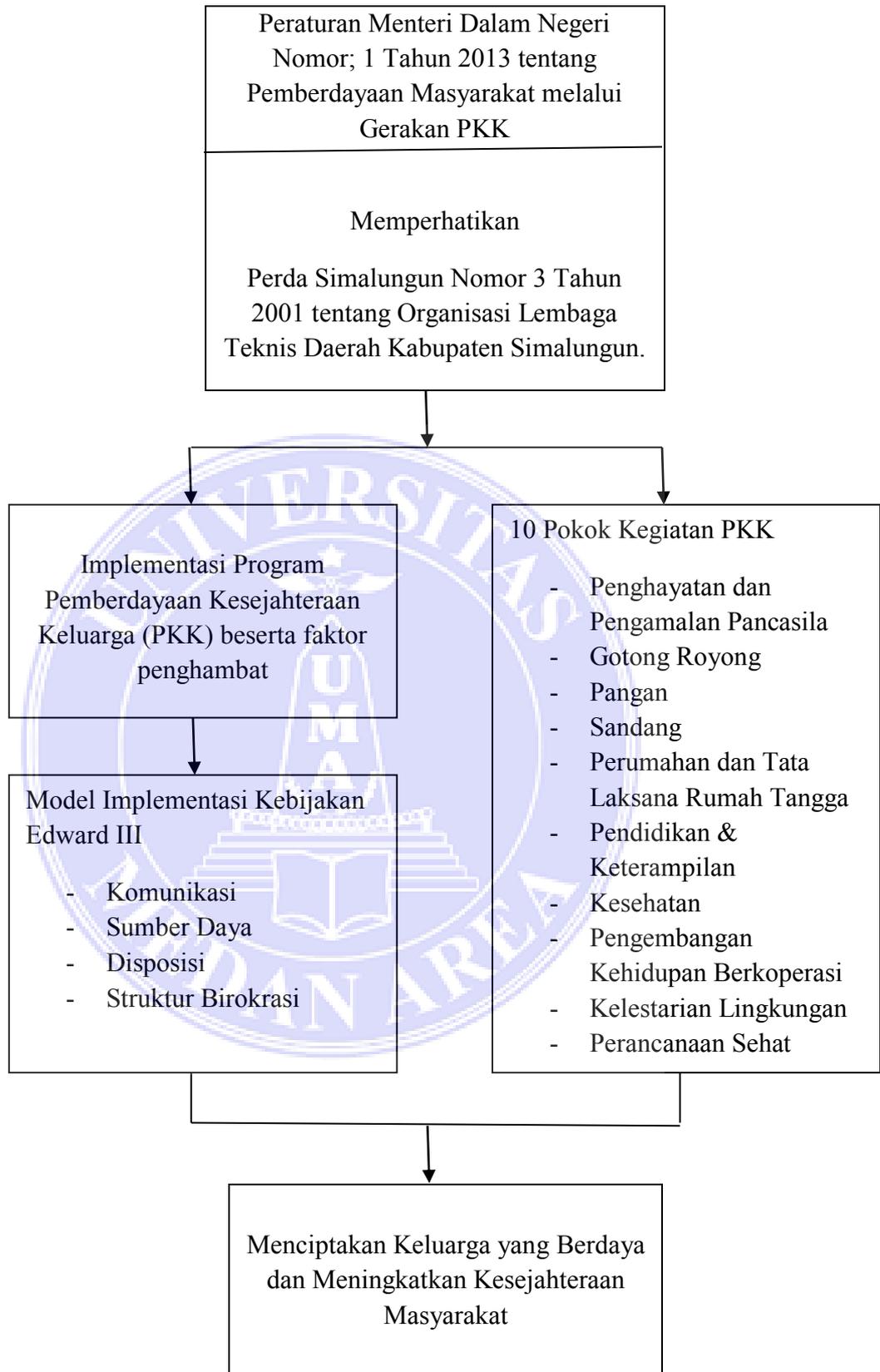
- a. Di Pusat, diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dengan anggota adalah para pimpinan instansi/lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri selaku ketua Pembina TP-PKK Pusat.
- b. Di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Diketuai oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat dengan anggota para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Bupati/Walikota, Camat selaku Ketua Pembina TP-PKK
- c. Di Desa/Kelurahan diketuai oleh Kepala Desa/Lurah dengan anggota para tokoh/pemuka masyarakat, Perangkat Desa/Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Pembina TP-PKK.

1.2 Kerangka Pemikiran

Sebagai titik tolak atau landasan untuk memecahkan masalah dalam penelitian implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Maka penulis mengambil teori implementasi kebijakan dari George C. Edward dalam Subarsono (2005:90). Dalam teori ini Edward memandang suatu implementasi kebijakan sangat ditentukan atau di pengaruhi oleh, yakni faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.

Jika 4 (empat) Indikator implementasi ini dapat berjalan dengan efektif maka Tim PKK (pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga) di Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun telah berhasil mewujudkan program PKK yang bertujuan menciptakan keluarga yang berdayaguna dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan batin.

Sehingga dengan adanya Tim PKK, di harapkan mampu membina karakter dalam kehidupan keluarga penuh cinta dan kasih sayang, mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumberdaya keluarga, meningkatkan kesehatan keluarga dan lingkungan, dan yang terpenting dapat membuat masyarakat yang dapat berdayaguna untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Penulis membuat suatu kerangka pemikiran yang disajikan pada bagan berikut:



Bagan 2.1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan berfokus kepada implementasi program Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga dan faktor penghambat dari program tersebut.

Menurut Sugiono (2012:15) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan data dengan triangulasi data (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif dan hasil peneliti kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan tempat penelitian yang telah dipilih peneliti. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian di mulai dari bulan Februari 2018 sampai bulan April 2018.

31.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian, adapun metode pengumpulan data sebagai berikut:

A. Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informan ini dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, jurnal, skripsi, tesis dan disertai peraturan-peraturan serta sumber-sumber tertulis.

B. Observasi

Menurut Husain Usman (2011:52) observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, dilakukan secara langsung pada objek penelitian dengan cara non partisipatif artinya tidak ikut serta dalam proses kerja dan mencatat hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Dalam observasi peneliti terlebih dahulu meninjau ke lokasi ataupun tempat yang ingin diteliti, yaitu Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

C. Wawancara

Menurut Arikunto (2006:155) mendefinisikan wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang di wawancarai. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua PKK Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.
- b) Informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan para anggota PKK Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.
- c) Informasi tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat interaksi sosial yang diteliti. Yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa Nagori Siantar Estate dan masyarakat.

D. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014:326) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data berupa catatan, dokumen, transkrip, buku serta peraturan yang berkaitan dengan fokus peneliti ini untuk dimanfaatkan agar dapat menunjang penelitian ini.

E. Triangulasi

Dalam metode pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

3.3 Metode Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2014:246) analisis data meliputi:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawan yang tinggi.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

4. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Setelah data disajikan maka dilakukan pengambilan keputusan atau verifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari yang semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara di verifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud data yang diperoleh tidak valid untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta : Gava Media.

Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta

Husain, Usman. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Sugiono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

-----, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

-----, 2014 *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Sumber: Buku Pedoman Umum Tim Penggerak PKK Pusat

Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*.
Surabaya : Gramedia Pustaka Utama.

Tangkilisan, 2003. *Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam Kebijakan Publik yang
Membumi, konsep, strategi dan kasus*. Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI

Winarno. 2007. *Proses dan Teori Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pressindo.

Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan. Dari Formulasi Ke Implementasi
Kebijakan Negara*. Malang.

SKRIPSI

Harmoko Rudi, 2013. *Implementasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju
Keluarga Sehat dan Sejahtera (PT.P2W-KSS) di Desa Silebu-lebu Kecamatan Kutalimbaru*.

Universitas Medan Area.

JURNAL

Rahmawati, Destri.2017. Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Muslim di Kabupaten Lampung Tengah. Masters thesis, UIN Raden Intan Lampung.

INTERNET

<http://www.pengertianpakar.com/2015/10/pengertian-tujuan-dan-proses-kebijakan-publik.html>

<http://www.tp-pkkpusat.org>

PERATURAN MENTERI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga

PERDA

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simalungun

Pasal 28

Badan Pemberdayaan Masyarakat Nagori mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagori.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 diatas, Badan Pemberdayaan Masyarakat Nagori Kabupaten Simalungun mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan ketahanan masyarakat Nagori

- b. Penyusunan rencana pelaksanaan sosial budaya masyarakat Nagori
- c. Pembinaan usaha ekonomi masyarakat Nagori
- d. Pembinaan terhadap pemanfaatan masyarakat nagori
- e. Penyiapan pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna
- f. Penyusunan program di bidang pemberdayaan masyarakat Nagori
- g. Penyusunan perencanaan program dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan perempuan, dan persiapan pelaksanaan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan perempuan.
- h. Pengumpulan data dan melakukan analisa dalam rangka penyiapan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan, penyusunan program dan penyiapan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan dalam rangka penghormatan martabat dan HAM bagi perempuan
- i. Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan masyarakat Nagori
- j. Fasilitasi dan evaluasi pemberdayaan masyarakat Nagori
- k. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan

LAMPIRAN

Pedoman wawancara informan kunci yaitu ketua PKK

1. Sebelum program PKK dilaksanakan, apakah sudah ada sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun?
2. Apakah selalu ada pengawasan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program PKK di Nagori?
3. Program apa saja yang sudah berjalan di Nagori Siantar Estate?
4. Bagaimana proses pelaksanaan program-program tersebut?
5. Apakah program PKK sudah sesuai dengan kebutuhan PKK?
6. Apakah program PKK dapat meningkatkan produktivitas masyarakat?
7. Apa yang membuat PKK menjadi pendorong kesejahteraan keluarga?
8. Bagaimana perwujudan PKK dalam mensejahterakan keluarga di Nagori?
9. Bagaimana perekrutan kader PKK di Nagori Siantar Estate?
10. Apakah penempatan POKJA sudah sesuai dengan keahlian para kader?
11. Bagaimana tanggungjawab para kader PKK terhadap tugasnya?
12. Bagaimana keaktifan para kader dalam program PKK?
13. Bagaimana antusiasme para kader dalam mengikuti program-program PKK?
14. Apakah program PKK memberikan wawasan baru bagi para kadernya?
15. Di dalam 10 Program PKK, dapatkah menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat dan dapatkah mempengaruhi ekonomi masyarakat?
16. Apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program-program PKK?
17. Bagaimana menangani hambatan tersebut?
18. Untuk kedepannya apa harapan ketua PKK untuk PKK Nagori tersebut?

Pedoman wawancara Informan Utama yaitu kepala desa dan para kader PKK

1. Sebelum program PKK dilaksanakan, apakah sudah ada sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun?
2. Apakah selalu ada pengawasan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program PKK di Nagori?
3. Apakah program PKK sudah sesuai dengan kebutuhan PKK?
4. Apakah program PKK dapat meningkatkan produktivitas masyarakat?
5. Berapakah anggaran dana untuk organisasi PKK ini?
6. Apakah kader sudah melaksanakan tugasnya dengan baik?
7. Apa para kader dapat merasakan manfaat dari organisasi PKK ini?
8. Apa alasan bergabung dengan PKK?
9. Apakah pernah mengikuti pelatihan/pembinaan dari pemerintah daerah?
10. Apakah mengikuti PKK menambah wawasan baru?
11. Apakah mengikuti PKK dapat membantu peningkatan kader-kadernya?
12. Apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program-program PKK?
13. Bagaimana menangani hambatan tersebut?

Pedoman wawancara Informan Tambahan yaitu masyarakat Nagori Siantar Estate,

1. Apa yang saudara tahu mengenai PKK?
2. Program apa saja yang sudah di lakukan PKK Nagori Siantar Estate?
3. Apakah saudara dapat merasakan pelaksanaan 10 program PKK Nagori ini?
4. Apakah adanya PKK dapat meningkatkan perekonomian masyarakat
5. Apakah adanya PKK
6. Apa harapan anda terhadap PKK Nagori Siantar Estate?
7. Apakah PKK sudah sesuai dengan harapan masyarakat?
8. Apa harapan masyarakat untuk organisasi PKK Nagori?



DATA-DATA INFORMAN

1. Informan Kunci

- a. Nama : Nurasiah
- b. Jabatan: Ketua PKK Nagori Siantar Estate

2. Informan Utama

- a. Nama : Fatmawati
Jabatan: Kader PKK Nagori Siantar Estate
- b. Nama : Juliani Hamid
Jabatan: Kader PKK Nagori Siantar Estate
- c. Nama : Muhammad Rusdi
Jabatan: Kepala Desa Nagori Siantar Estate

3. Informan Tambahan

- a. Nama : Aria Fandali
Jabatan : Tokoh Masyarakat Nagori Siantar Estate
- b. Nama : Assyaroh Mei
Jabatan : Tokoh Masyarakat Nagori Siantar Estate

DOKUMENTASI

1. Foto bersama Ketua PKK Nagori Siantar Estate Ibu Nurasih



2. Foto bersama Kader PKK Nagori Siantar Estate Ibu Fatmawati



3. Foto bersama Kader PKK Nagori Siantar Estate



4. Foto sosialisasi kecamatan mengenai kesehatan lansia

